

BAB III

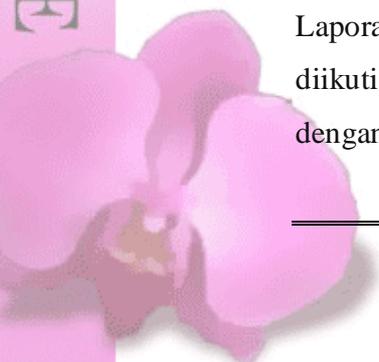
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farah Lydia Eka Rini pada tahun 2014 yang berjudul *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP* menyimpulkan bahwa UMKM CV. Mandiri belum menerapkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. CV. Mandiri hanya memiliki buku kas untuk mencatat neraca keuangan yang menyajikan pendapatan dan pengeluaran kas harian dan bulanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Saragih dan Surikayanti pada tahun 2015 yang berjudul *Analisis Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP* menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pada UMKM masih sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi dalam usahanya. Sebagian besar UMKM hanya membuat laporan laba – rugi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan UMKM mengenai SAK ETAP serta tidak adanya sosialisasi atau pelatihan sehingga pemahaman akan pentingnya SAK ETAP yang belum dipahami oleh pelaku UMKM.

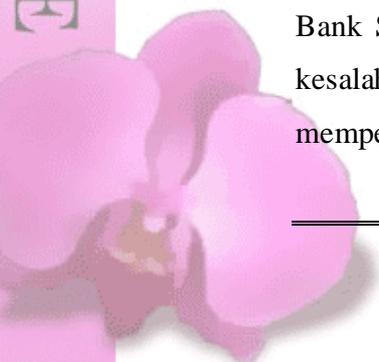
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatwa pada tahun 2016 yang berjudul *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Usaha Kecil Menengah* menyimpulkan bahwa pengusaha penggilingan padi belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini dapat dilihat tidak adanya perhitungan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk UKM ini. UKM ini hanya menyusun laporan laba rugi dan neraca secara sederhana. Laporan keuangan yang ditampilkan hanyalah pencatatan transaksi bulanan yang diikuti laporan laba rugi, neraca diakhir periode. Artinya penyusunan yang sesuai dengan standar SAK ETAP belum diimplementasikan secara penuh.



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lilya Andriani, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Ni Kadek Sinarwati pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Intrepetantif Pada Peggy Salon) yang menyimpulkan bahwa sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawannya. Selain itu faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada Peggy Salon karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari *stakeholder* yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ersanti Anggunan Dewi pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bandar Lampung menyimpulkan bahwa dari penelitian tersebut tidak dapat memberi bukti bahwa latar belakang pendidikan, umur usaha, dan skala usaha berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP sedangkan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raven Pardomuan Siagian dan Sifrid S. Pengemanan pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut GO menyatakan bahwa berdasarkan pada penyajian neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas tahun 2015 dan laporan arus kas tahun 2012, menunjukkan Kopkar Bank Sulut Go belum menyajikan catatan atas laporan keuangan (CALK), adanya kesalahan dalam pengklasifikasian pos akun, serta adanya inkonsistensi dalam memperbarui laporan arus kas. Penelitian ini menyarankan agar koperasi



mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK, memperbarui setiap komponen laporan keuangan, dan mempekerjakan karyawan yang terampil di bidang akuntansi.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan Paul D. Kimmel (2007, hal 4), “akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa – peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.”

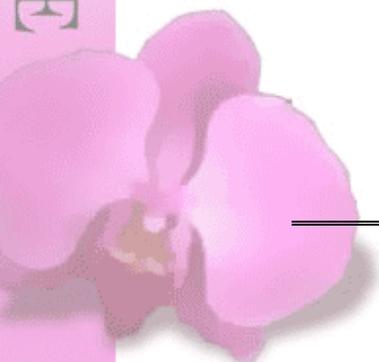
Pengertian akuntansi menurut Soemarso (2004, hal 14), akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.”

Menurut Carl S. Warren et all dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia (2016, hal 3) akuntansi secara umum dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Dalam bukunya Carl S. Warren et all mengatakan bahwa proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi dan diakhiri dengan posting ayat jurnal penutup disebut dengan siklus akuntansi.

Langkah – langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mencatat transaksi- transaksi kedalam jurnal.
2. Posting transaksi tersebut ke buku besar.
3. Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan.
4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian.
5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode (opsional).



6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar.
7. Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan.
8. Menyiapkan laporan keuangan.
9. Membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar.
10. Menyiapkan daftar saldo setelah penutup.

Menurut Soemarso dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Suatu Pengantar menjelaskan bahwa siklus akuntansi terdiri dari kegiatan – kegiatan yaitu:

Tahap Pencatatan:

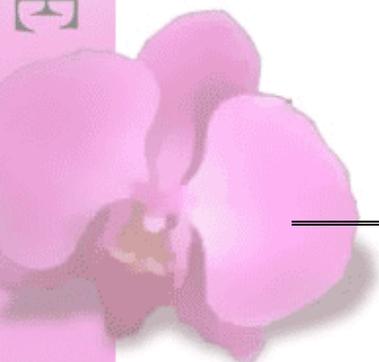
1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi
2. Pencatatan dalam jurnal
3. Pemindah – bukuan ke buku besar

Tahap Pengikhtisaran:

4. Pembuatan neraca saldo
5. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian
6. Penyusunan laporan keuangan
7. Pembuatan jurnal penutup
8. Pembuatan neraca saldo penutup
9. Pembuatan jurnal balik

Dalam akuntansi dibutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk melaporkan aktifitas akuntansinya. Selain itu, laporan keuangan juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan, misalnya:

- pemegang saham,
- kreditor,
- pekerja, dan
- masyarakat dalam arti luas



2.2.2. SAK ETAP

SAK ETAP atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal atau pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik jika:

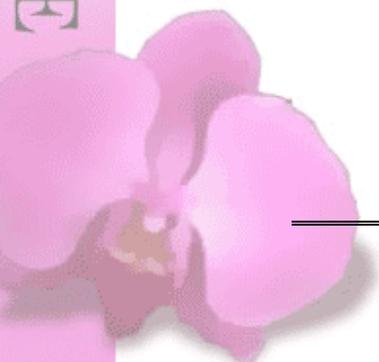
- Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan
- Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal

Ketentuan Transisi:

- ETAP dapat memilih tetap menggunakan PSAK – IFRS atau menggunakan SAK ETAP.
- Seluruh entitas sampai dengan 31 Desember 2009 menggunakan satu PSAK yaitu PSAK yang berlaku per 31 Desember 2009.
- ETAP yang tetap memilih menggunakan PSAK – IFRS tidak boleh dikemudian hari berubah menggunakan SAK ETAP.
- Entitas dengan akuntabilitas publik yang kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai ETAP dapat menggunakan SAK ETAP.
- ETAP yang kemudian berubah menjadi bukan ETAP maka harus menggunakan PSAK – IFRS dan tidak boleh lagi menggunakan SAK ETAP.

Manfaat SAK ETAP:

- Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.



- Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya
- Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK – IFRS adalah materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK – IFRS lebih rumit. SAK ETAP cenderung menggunakan basis stewardship sebagai pertanggung jawaban pengelola kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSAK – IFRS telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan.

SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan, SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas. SAK ETAP menggunakan cost model untuk investasi keasosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan. SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK50/55. SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi, sedangkan PSAK – IFRS boleh memilih cost model atau model revaluasi.

Tabel 1

Pembagian bab dalam SAK ETAP

No.	Bab	Materi
1.	Bab 1	Ruang lingkup
2.	Bab 2	Konsep dan prinsip pervasif
3.	Bab 3	Penyajian laporan keuangan
4.	Bab 4	Neraca
5.	Bab 5	Laporan laba rugi
6.	Bab 6	Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba
7.	Bab 7	Laporan arus kas
8.	Bab 8	Catatan atas laporan keuangan

9.	Bab 9	Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan
10.	Bab 10	Investasi pada efek tertentu
11.	Bab 11	Persediaan
12.	Bab 12	Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak
13.	Bab 13	Investasi pada joint venture
No.	Bab	Materi
14.	Bab 14	Properti investasi
15.	Bab 15	Aset tetap
16.	Bab 16	Aset tidak berwujud
17.	Bab 17	Sewa
18.	Bab 18	Kewajiban diestimasi dan kontijensi
19.	Bab 19	Ekuitas
20.	Bab 20	Pendapatan
21.	Bab 21	Biaya pinjaman
22.	Bab 22	Penurunan nilai aset
23.	Bab 23	Imbalan kerja
24.	Bab 24	Pajak penghasilan
25.	Bab 25	Mata uang pelaporan
26.	Bab 26	Transaksi dalam mata uang asing
27.	Bab 27	Peristiwa setelah akhir periode pelaporan
28.	Bab 28	Pengungkapan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa
29.	Bab 29	Ketentuan transaksi
30.	Bab 30	Tanggal efektif

Pada dasarnya dalam laporan keuangan ada lima komponen laporan keuangan antara lain, laporan Laba/Rugi, laporan Perubahan Ekuitas, laporan Posisi Keuangan, laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tetapi dalam laporan keuangan menurut Ikatan Indonesia dalam SAK ETAP (2009), komponen dari laporan keuangan antara lain:

a. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos

seperti: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain seperti, tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, beban pajak, laba atau rugi neto.

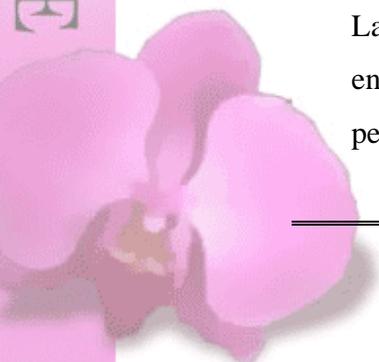
c. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan:

1. Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk didalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.
2. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.



e. Catatan atas laporan keuangan

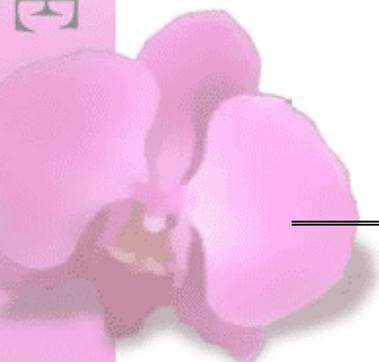
Laporan ini berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009):

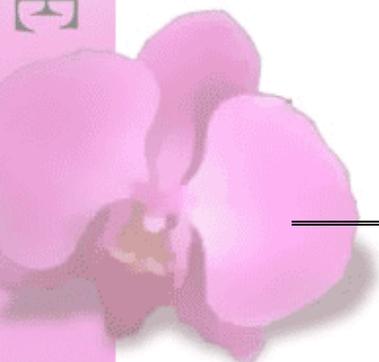
1. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

a) Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas
- Dimiliki untuk diperdagangkan
- Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.



- b) Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.
2. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- a) Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:
- Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas
 - Dimiliki untuk diperdagangkan
 - Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan
 - Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- b) Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.
3. Pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
4. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan



kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Laba atau rugi merupakan selisih antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

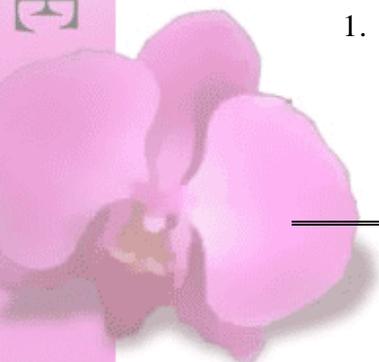
2.2.3. Usaha Kecil dan Menengah

Dalam UU no. 20/2008, yang dimaksud usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang, yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur Undang-Undang, yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



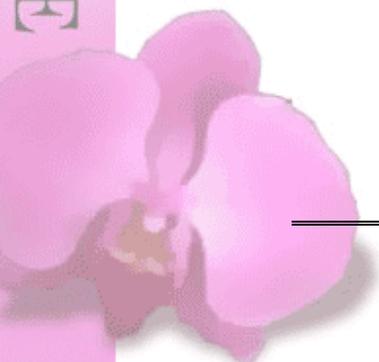
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.4. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah

2.2.4.1 Keunggulan UKM

Menurut M. Tohar (2000, Hal.27), secara umum perusahaan dalam skala kecil itu usaha perseorangan maupun persekutuan (kerja sama) yang memiliki kelebihan dan daya tarik. Kelebihan dan daya tarik tersebut adalah:

- a. Pemilik merangkap manajer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, *finance*, dan administrasi
- b. Dalam pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian menejerial yang handal
- c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barangdan jasa-jasa baru.
- d. Risiko usaha menjadi beban pemilik
- e. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, tetapi kadang-kadang terlalu cepat dan bahkan premature.
- f. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
- g. Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa
- h. Prosedur hukumnya sederhana.
- i. Pajak relatif ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi pengusaha, bukan perusahaannya.
- j. Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi.
- k. Mudah dalam proses pendiriannya
- l. Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.



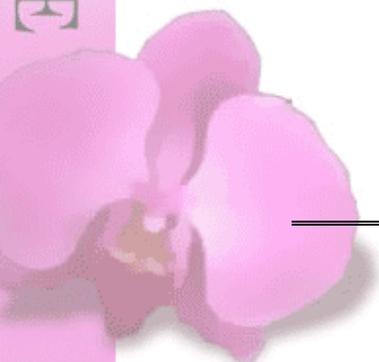
- m. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
- n. Pemilik menerima seluruh laba.
- o. Umumnya mampu untuk survive.
- p. Cocok untuk mengelola produk, jasa dan proyek perintisan yang sama sekali baru, atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.
- q. Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintahan demi berkembangnya usaha kecil.
- r. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreativitas pengelola.
- s. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainnya relative tidak terlalu mahal.
- t. Mempunyai ketergantungan secara moril dan semangat usaha dengan pengusaha kecil lainnya.

2.2.4.2 Kelemahan UKM

Ukuran usaha kecil menengah selain memiliki kelebihan juga mengandung kekurangan yang membuat pengelolanya mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha kecil menengah antara lain:

1. Sempitnya Waktu untuk Melengkapi Kebutuhan.

Sebab sedikitnya jumlah pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah, mereka kerap terpaksa harus pontang-panting berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya, yakni: produksi, sales, dan marketing. Hal ini bisa mengakibatkan tekanan jadwal yang besar, membuat mereka tidak bisa fokus menyelesaikan permasalahan satu persatu.



Tekanan semacam ini bisa muncul tiba-tiba ketika bisnis mereka memperoleh order dalam jumlah yang besar, atau beberapa order yang masuk dalam waktu hampir bersamaan. Lebih dahsyat lagi jika suatu ketika ada lembaga bisnis besar yang merasa terancam dan mulai melancarkan serangan yang tidak fair demi menyingkirkan pesaing potensialnya.

2. Kontrol Ketat atas Anggaran dan Pembiayaan

Usaha skala kecil umumnya memiliki anggaran yang kecil. Akibatnya, ia kerap kali dipaksakan membagi-bagi dana untuk membiayai berbagai kebutuhan seefisien mungkin. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan modal yang lebih besar juga memaksa usaha kecil menengah menjalankan kebijakan penghematan yang ketat, terutama untuk mencegah kekurangan pembiayaan operasional sekecil apapun. Kekurangan pembiayaan operasional yang tidak dicegah bisa mengakibatkan kebangkrutan, sebab kapasitas UKM untuk membayar hutang biasanya hampir tidak ada.

3. Kurangnya Tenaga Ahli

Usaha kecil menengah biasanya tidak mampu membayar jasa tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Hal ini merupakan kelemahan usaha kecil menengah yang sangat serius. Apalagi jika dibandingkan dengan lembaga bisnis besar yang mampu mempekerjakan banyak tenaga ahli. Kualitas produk barang atau jasa yang bisa dihasilkan tanpa tenaga ahli sangat mungkin berada di bawah standar tertentu. Akibatnya, kemampuan persaingan bisnis skala kecil ini di pasar yang luas bisa sangat kecil.

